



Peran LKP Dalam Membantu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Berwirausaha Sesuai Dengan Keterampilan Yang Dimiliki

Ely Nina Kharina¹, Eviza Husnika², Febby Handani³

^{1,2,3} Lembaga Kursus Keterampilan (LKP) Kreatif, Medan, Sumatera Utara

Email : elyninakharina@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menggambarkan bagaimana peranan dari sebuah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam membantu masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut dalam membangun sebuah usaha/berwirausaha sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Diharapkan melalui kegiatan wirausaha tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebelumnya sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan mendapatkan keterampilan, serta mampu mengembangkannya dan mengaplikasikannya dalam sebuah bentuk wirausaha. Kajian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini ialah berbentuk Kajian Literatur ilmiah. Hasil Kajian ilmiah ini juga akan menjelaskan mengenai apa itu LKP, manfaat mengikuti kegiatan pelatihan di LKP, dan bagaimana peran LKP dalam membantu masyarakat dalam berwirausaha.

Kata Kunci : Peranan LKP, Model Pelatihan, Kewirausahaan

The Role of LKP in Helping the Community's Economy by Entrepreneurship in Accordance With the Skills Possessed

The purpose of writing this article is to illustrate how the role of a course and Institute Training Course (LKP) in helping people who take the training in building a business or be an entrepreneurship is in accordance with skill that they have. It is hoped that through these entrepreneurial activities it can help improve the economy of the people who have previously participated in training activities and gain skills, and be able to develop them and apply them in an entrepreneurial form. The study conducted in writing this article is in the form of scientific literature studies. The results of this scientific study will also explain what ITC is, the benefits of participating in training activities at LKP, and how the LKP's role is in helping the community in entrepreneurship.

Keywords: Role of LKP, Training Model, Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan modal manusia di era global saat ini. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tidak ada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk mengupayakan segala cara dalam meningkatkan daya saing lulusan serta

produk-produk akademik lainnya, antara lain dicapai melalui perbaikan sistem pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang berkualitas sebagai bagian dari suatu masyarakat yang terus belajar (*learning society*). Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar (2004:5) bahwa "Memasuki era globalisasi di abad ke-21 diperlukan suatu paradigma baru dalam sistem pendidikan dunia, dalam rangka

mencerdaskan umat manusia dan memelihara persaudaraan”.

Sedangkan menurut International Commission on Education for the Twenty-First Century & Delors (1996:19), “*Although people need to take every opportunity for learning and self-improvement, they will not be able to make good use of all these potential resources unless they have received a sound basic education*”. Meskipun bagaimanapun orang perlu mengambil setiap kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, mereka tidak akan dapat memanfaatkan semua sumber daya potensial kecuali jika mereka telah mendapatkan pendidikan dasar yang baik.

Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam memajukan suatu Lembaga, agar kegiatan dalam Lembaga dapat berjalan dengan lancar. Pengelolaan bisa diartikan juga sebagai manajemen atau perencanaan. Menurut Arikunto (1996: 7-8) pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “Management” atau Manajemen. Arti lain dari pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Menurut Ikram (2012:01) menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam menjalankan pengelolaan LKP dibutuhkan pemimpin atau manajer untuk memajemen dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi manajemen secara efisien dan efektif. Dalam hal ini mengelola program pelatihan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di suatu lembaga atau instansi dan membutuhkan suatu penanganan dan pengelolaan yang sangat serius. Sesuai dengan pendapat Sudaryat (2010: 01). Manajemen pelatihan dimaksudkan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa

kegiatan melatih. Sebagai suatu proses, istilah manajemen pelatihan bergamitan dengan trisula aktivitas, yakni :

- a) perencanaan,
- b) pelaksanaan, dan
- c) evaluasi.

Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki perhatian penuh terhadap pengembangan manusia atau lulusan yang berkualitas adalah pendidikan luar sekolah. Trisnamansyah (Kamil, 2012:30) menyatakan bahwa “Ilmu pendidikan luar sekolah diartikan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari interaksi sosial-budaya antara warga belajar sebagai objek dengan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dengan menekankan pada pembentukan kemandirian, dalam rangka belajar sepanjang hayat”. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU SPN No. 20/2003).

Pembangunan Nasional ditujukan kepada terlaksananya masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan sprituil. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan bathiniyah saja, melainkan keselarasan dan keseimbangan keduanya, bahwa pembangunan itu bukan untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita (GBHN, 1993). Yang menjadi perhatian pada hakikatnya pembangunan nasional adalah untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ini berarti yang akan dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia dengan segala aspek-

aspeknya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Setiap warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Pengertian warga negara disini jelas tidak mengecualikan pemuda-pemudi yang putus sekolah (*drop out*) juga mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menikmati hak-hak kemanusiaan yang asasi, serta berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai bagi

mereka. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27, bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu diperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan bagi pemuda-pemudi yang putus sekolah. Kesemuanya itu dapat dicapai di lembaga-lembaga kursus, ataupun di pendidikan nonformal lainnya, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C pada satuan PNF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kursus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke empat menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga kursus sebagai lembaga pendidikan luar sekolah (PLS) yang diprakarsai, dibiayai, dan diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok maupun komunitas yang melayani masyarakat dalam belajar guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan (*skill*) fungsional, dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Triyana, 2012, hlm. 14)

b. Sistem Pembelajaran Kursus

Menurut Komar (Komar, 2006, hlm. 203-204) salah satu pengertian sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, system kegiatan pendidikan pada satuan kursus

terdiri atas input, proses dan output. Input satuan kursus terbagi atas: input lingkungan (*environmental input*), input instrumen (*instrumental input*), input bahan mentah (*raw input*), dan input lain (*other input*). Di antara faktor yang merupakan input lingkungan adalah keadaan alam sekitar, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, sosial ekonomi, biaya, sarana dan kebiasaan/tradisi. Input instrumen satuan kursus terdiri dari tujuan, kurikulum, tenaga kependidikan, pembiayaan, sumber daya dan media belajar, fasilitas dan kondisi pengelola program. Input bahan mentah terdiri atas karakteristik internal dan eksternal warga belajar. Diantaranya menyangkut pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kesiapan, motivasi, sosial ekonomi, biaya, sarana, dan kebiasaan belajar.

Input lain merupakan faktor pendukung terhadap pengaktualisasian kemampuan yang telah diperoleh oleh warga belajar selama pendidikan berlangsung, seperti lapangan pekerjaan, permodalan, pemasaran, fasilitas informasi, kursus lanjutan, dan ikatan lulusan. Proses (*throughput*) yang terjadi di dalam satuan kursus merupakan fungsi dari peran serta dan bekerjanya faktor input (input lingkungan, instrumen, bahan mentah dan input lain). Selama proses berlangsung, bagi input bahan mentah akan terjadi pengentasan dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, latihan dan interaksi lainnya yang memungkinkan terwujudnya perubahan pada pengetahuan, sikap, keterampilan dan kebiasaan warga belajar. Output satuan kursus berkenaan

dengan produk dan dampak. Produk berhubungan dengan segala hal yang dihasilkan oleh kursus baik berkualitas maupun kuantitasnya serta barang dan jasa. Adapun dampak (*outcome*) berhubungan dengan konsekuensi ikatan yang melekat pada warga belajar setelah mengikuti pendidikan, seperti perubahan taraf hidup, penyebarluasan bahan belajar, serta peningkatan partisipasi sosial dalam pembangunan.

2. Konsep Kewirausahaan

a. Pengertian Kewirausahaan

Secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). (Kasmir, 2006, hlm. 16-17)

b. Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan

Tujuan menjadi seorang wirausahawan salah satunya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari ide/produk yang diciptakan sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Adapun tujuan kewirausahaan (Rahmawati, 2013), antara lain: 1) meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, 2) mewujudkan kemampuan dan kemandirian para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, 3) membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul, dan 4) menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat.

c. Ciri-Ciri Wirausaha

Menurut Meredith (2005) (dalam Bayu, 2010, hlm. 50-51), seorang wirausaha haruslah

seorang yang mampu melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternative masalah dan pemecahannya.

3. Pengelolaan Pembelajaran Kursus

a. Kemitraan

Jaringan kemitraan (Kamil, 2010, hlm. 166) adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Menurut Kartasasmita (1996) (dalam Banowati, 2014, hlm. 31) kemitraan terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja strategis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sumgame*, tetapi *positive-sumgame* atau *win-win situation*. Menurut Kartasasmita (1996) (dalam Banowati, 2014, hlm. 33) dalam upaya mengembangkan dunia usaha, terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara lain: 1) kemitraan antar skala usaha, 2) kemitraan usaha antar daerah tau antar kawasan, 3) kemitraan usaha antar sektor, dan 4) kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek.

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap-pakai (*ready for use*) dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Gunawan, 2002, hlm.114) Secara otimologis (arti kata) (Daryanto, 2008, hlm. 51) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan.

Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sedangkan, sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan misalnya ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Sedangkan, menurut Keputusan Menteri P dan K No. 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu: 1) bangunan dan perabot sekolah, 2) alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium, dan 3) media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

c. Modal dan Strategi Kewirausahaan

Dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud (*tangible*) seperti uang dan barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud (*intangible*) seperti modal intelektual, modal sosial, modal moral, dan modal mental yang dilandasi agama. Secara garis besar, modal kewirausahaan dapat dibagi ke dalam empat jenis (Riswari, 2014), yaitu: 1) Modal Intelektual. Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya. 2) Modal Sosial dan Moral.

Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga dapat membentuk sebuah kerjasama. Seorang wirausaha yang baik biasanya memiliki etika wirausaha seperti: (a) kejujuran; (b) memiliki integritas; (c) menepati janji; (d) kesetiaan; (e) kewajaran; (f) suka membantu orang lain; (g) menghormati orang lain; (h) warga negara yang baik dan taat hukum; (i) mengejar keunggulan; dan (j) bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi maupun sosial, kejujuran, integritas, dan ketepatan janji merupakan modal sosial yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari waktu ke waktu. 3) Modal Mental. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan

landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian. 4) Modal Material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang.

Modal ini terbentuk apabila seseorang memiliki jenis-jenis modal di atas. Dalam konsep strategi pemasaran terdapat istilah bauran dikenal dengan 4P, yaitu barang dan jasa (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*). Dalam kewirausahaan, 4P tersebut ditambahkan satu P, yaitu *probe* (penelitian dan pengembangan) sehingga menjadi 5P. Dalam riset pemasaran, *probe* selalu ditambahkan di awal sehingga urutan bauran pemasaran menjadi: a) *probe* (penelitian dan pengembangan); b) *product* (barang dan jasa); c) *price* (harga); d) *place* (tempat); dan e) *promotion* (promosi). Penelitian dan pengembangan dalam kewirausahaan merupakan strategi utama karena memiliki keterkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Di dalamnya tercakup penelitian dan pengembangan produk, harga, tempat, dan promosi. Wirausaha berkembang dan berhasil karena memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang memadai sehingga tercipta barang-barang yang bernilai dan unggul di pasar (Riswari, 2014).

4. Kewirausahaan dalam Pendidikan Masyarakat

Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Kewirausahaan dapat membantu proses pembangunan ekonomi suatu negara.

Hal ini dikarenakan dalam suatu kewirausahaan terdapat kreativitas, intuisi dan mampu memanfaatkan peluang yang berorientasi terhadap kebutuhan manusia dan sejalan dengan tren yang ada di negara-negara maju dimana wirausaha sangat

menonjol memainkan peranan penting dan bermutu dalam masyarakat. Untuk membentuk masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha yang baik, diperlukan suatu proses pendidikan kewirausahaan dalam masyarakat. Pendidikan nonformal menjadi satu alternatif terbaik dalam menjalankan proses pengenalan sampai pengawasan kewirausahaan oleh masyarakat. Ide- ide yang terkait dengan pemberdayaan sektor pendidikan nonformal untuk mengembangkan kewirausahaan dalam rangka ekonomi global antara lain:

Dengan cara lebih memfokuskan pada pemuda yang ada di suatu daerah, terkhusus pemuda yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan juga. Selain dikarenakan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat masih rendah, sehingga sulit untuk dapat terserap oleh dunia kerja, juga ada beberapa faktor lainnya seperti terbatasnya akses pendidikan untuk beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Pelatihan kewirausahaan sangat penting diberikan kepada para pemuda mengingat pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Di berbagai daerah terpencil di Indonesia banyak pemuda yang belum memperoleh pendidikan formal, oleh karena itu pemberian pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan kewirausahaan ini sangat perlu dilakukan untuk membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang tidak bisa mereka akses melalui pendidikan formal.

Melalui pelatihan kewirausahaan, pemuda diberikan pengenalan tentang kewirausahaan, motivasi serta pemberian keterampilan-keterampilan yang akan membekali mereka untuk hidup di masyarakat. Dengan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan dan keterampilan mereka diharapkan mampu mandiri untuk

SIMPULAN & SARAN

Ada beberapa hal yang bisa di simpulkan dari pembahasan ini yaitu :

1. Tujuan penulisan agar segala pihak dapat membaca semua aspek tentang Etika bisnis kewirausahaan dalam pendidikan masyarakat.

mendirikan usaha yang akan mendatangkan penghasilan bagi mereka. Dengan demikian, jumlah pengangguran dapat berkurang dan perekonomian negara di tengah ekonomi globalpun dapat terbantu dengan meningkatnya jumlah wirausaha, terutama wirausaha di daerah pedesaan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan terbukanya arus globalisasi dan informasi, serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, meskipun tetap lebih rendah dari pada tingkat pendidikan laki-laki sebagai ditunjukkan data BPS tahun 2000, perempuan Indonesia sudah keluar dari tembok batas rumahnya untuk bekerja dan berkarya, baik sebagai pegawai pemerintah, karyawati, perusahaan baik nasional maupun multinasional, serta sebagai pengusaha, dengan tidak mengabaikan peran utamanya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.

Hal tersebut menandakan bahwa perempuan juga merupakan aset penting yang dapat dikembangkan untuk membangun perekonomian di suatu Negara. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung perekonomian di era global ini dapat dilakukan dengan pemberian kursus kewirausahaan. Kursus kewirausahaan bagi perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kewirausahaan, pemberian keterampilan seperti memasak, menjahit, membuat kerajinan tangan, dsb. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan bagi para pengangguran di perkotaan, maka akan melahirkan calon-calon wirausaha baru yang nantinya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran yang ada dan cukup tinggi juga sampai saat ini.

2. Etika Berbisnis bukan hanya di terapkan dalam bisnis yang sedang terjalin di kalangan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga harus di terapkan di kalangan masyarakat awam dalam lingkup pendidikan masyarakat.

3. Seperti penerapan di pendidikan masyarakat yaitu dalam pendidikan kecakapan hidup. Penerapan prinsip etika berbisnis belum semua ada didalamnya.

Saran dari kami sebagai penulis sekaligus mahasiswa, semoga apa yang kami tuliskan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memulai berwirausaha, terkhusus bagi masyarakat yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan di LKP atau tempay kursus spesifik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyuni, Joko. Pembelajaran Kursus Menjahit Di Lembaga Kursus & Pelatihan . Universitas Sriwijaya. Herwina, Wiwin, 2017.

Journal of Nonformal Education & Empowerment: PLS FKIP Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Halimah Eneng, dkk. Pengelolaan Pembelajaran Dalam Menumbuhkan Kemampuan Berwirausaha Lulusan Kursus Komputer Desain Grafis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Majalaya.

Rizaldi, William. 2016. Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Komputer. *Skripsi Pendidikan Luar Sekolah* :Semarang.

PROFIL SINGKAT

Penulis merupakan Instruktur kursus pelatihan kewirausahaan LKP Kreatif., Elynina Kharina Br Ginting, lahir di Kabanjahe 09 Juni 1999 . Eviza Husnika ,Lahir di Stabat -8 April 1999 . Febby Handani Harahap, Lahir di Padangsidempuan, 25 Februari 1999. Kami berlatar belakang pendidikan luar sekolah alumni Universitas Negeri medan.

Oktarina, Silvia. 2016. Pengelolaan Lembaga Kursus Pelatihan Bordir (Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Pelatihan Bordir Muslimah Group). Solok.

Sumitro. Analisis Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen. *Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah* : Labuhan Batu.

Rahmawan, Ginanjar. Tren Pembelian Produk Online. *Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah*: Surakarta.

Skirman. 2017. Jiwa Kewirausahaan, Nilai Kewirausahaan, Perilaku Kewirausahaan, Kemandirian Usaha.

. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Banu, Bambang. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Bisnis* :Malang